



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 273 /KEP/HK/2017

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 14/KEP/HK/2017 TENTANG TIM HARMONISASI PEMBULATAN
DAN PEMANTAPAN KONSEPSIPERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 14/KEP/HK/2017 telah dibentuk Tim Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa terdapat beberapa anggota Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengalami mutasi keluar Biro Hukum, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 14/KEP/HK/2017 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 14 /KEP/HK/2017 tentang Tim Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 14 /KEP/HK/2017 tentang Tim Harmonisasi Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 OKTOBER 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ✓
SEKRETARIS DAERAH,

✓

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 273 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 25 OKTOBER 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM HARMONISASI PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI PERATURAN, KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT.
3	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Kasubag. Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
6	Ronaldo Engelbert, SE/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; b. meneliti Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; dan d. sebagai operator Komputer.
7	Basri Ali/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Yiwa Hunggu Ndami, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Mariana Laikopan/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Delfim Do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
13	Benyamin P. Fanggidae/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
14	Ronald M. A Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan proses administrasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; b. meneliti Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; c. melaksanakan proses administrasi dalam pengajuan Rancangan Peraturan, Keputusan dan Instruksi Gubernur NTT; dan d. sebagai operator Komputer.
15	Elisabeth Inda Maria Lio, S. STP/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR /
 SEKRETARIS DAERAH,

✓ 
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19620524 198903 1 014